

**ANALISA PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DALAM PENGUATAN MODAL USAHA**

**(Studi Kasus Kelompok Tani Buah Sakato di Kenagarian Sinurut
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)**

OLEH

DESI ALIYAWERI
02115037



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**ANALISA PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DALAM PENGUATAN MODAL USAHA**

**(Studi Kasus : Kelompok Tani Buah Sakato di Kenagarian Sinurut
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Mei sampai Juni 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah anggota kelompok yang berjumlah 35 orang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di kelompok Tani Buah Sakato (2) Menganalisa bagaimana anggota kelompok tani dalam memanfaatkan dan mengelola dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dan (3) Untuk mengetahui bagaimana pengembalian dana oleh anggota kelompok.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penguatan pada kelompok Tani Buah Sakato Kenagarian Sinurut Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat pada juknis, dimana sosialisasi di Kecamatan hanya dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan tanpa adanya pengawasan dari tim teknis dan pendamping Kabupaten. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program PNPM-MP ini. Dalam pemanfaatan dana pinjaman PNPM-MP digunakan oleh anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan anggota dan penggunaannya disesuaikan dengan apa yang mereka ajukan dalam proposal, begitu juga dengan pengelolaan dana oleh anggota kelompok, dana ini dikelola sendiri oleh anggota kelompok. Dilihat dari pengembalian dana baik dari ketua kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan maupun dari anggota ke ketua kelompok sudah berjalan dengan semestinya dimana tidak terdapat kelompok maupun anggota yang melakukan penunggakan dalam pembayaran.

Diharapkan kepada tim teknis Kabupaten untuk ikut serta dalam sosialisasi program di Kecamatan, begitu juga dengan musyawarah-musyawarah nagari. Dengan demikian diharapkan lagi semua anggota dapat terlibat sehingga dapat menjalankan program ini sesuai dengan prosedur dan tujuan program PNPM-MP.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi berhasilnya usaha pembangunan manusia yang menyeluruh. Pembangunan pertanian sampai saat ini masih mempunyai peranan yang dominan dalam pembangunan daerah, dimana pemerintah lebih memfokuskan dalam bentuk stimulan, regulasi, dan fasilitasi guna pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis, selanjutnya petani/pelaku agribisnis didorong untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional, efektif dan efisien serta mampu bersaing dipasar bebas/globalisasi (Direktorat Jendral Bina Produksi Tanaman Pangan, 2003)

Selaku Negara Agraris, perekonomian Indonesia didukung oleh sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, maka demi kelangsungan pembangunan nasional, sektor pertanian Indonesia perlu ditumbuhkan. (Bachrawi,2004)

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran, kemiskinan diIndonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipacu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Konsep pembangunan telah dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai dasar pemupukan modal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana sebagai modal usaha, pelatihan yang tepat, penerapan teknik yang tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung, penyediaan yang menunjang dan penguatan kelembagaan sebagai wadah usaha masyarakat (Sumodiningrat, 1997)

Untuk menanggulangi masyarakat dari keterpurukan sosial ekonomi, pemerintah berupaya mencari solusi dengan memprioritaskan berbagai program strategi untuk mengatasinya mulai dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) dan juga Program yang serupa diluncurkan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat petani dalam hal pemberdayaan masyarakat pertanian yaitu melalui pemberian dana bantuan yang dinamakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama ditingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) ini dimulai pada tahun 2007. Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya pengurangan kemiskinan (Pedoman Umum PNPM-MP 2007)

PNPM pada hakekatnya adalah gerakan nasional dalam wujud pembangunan berbasis masyarakat yang menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin. Tujuan dari PNPM-MP adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM-MP merupakan kelanjutan PPK (Program Pengembangan Masyarakat) yang selama ini dinilai berhasil. Secara umum visi PNPM-MP adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan, kesejahteraan berarti pemenuhannya kebutuhan dasar masyarakat (Petunjuk Teknis Operasional, 2007)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Analisa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Penguatan Modal Usaha pada Kelompok Tani Buah Sakato di Kenagarian Sinurut Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, dapat ditarik kesimpulan.

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar acuan pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pada kelompok tani Buah Sakato dana pinjaman diperuntukkan untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP). Pada pelaksanaan sosialisasi dilapangan tidak berjalan sesuai juknis yang ada dimana pada proses sosialisasi dilapangan hanya dilakukan oleh UPK tanpa adanya pengawasan dari Kabupaten, begitu juga musyawarah antar Nagari tidak melibatkan anggota kelompok tetapi hanya melibatkan ketua kelompok dan sekretaris.
2. Dana pinjaman dari PNPM-MP digunakan oleh anggota untuk pembelian bibit jagung, pembelian pupuk, makanan ternak ayam, pembelian herbisida, upah pekerja dan pembuatan kandang. Dengan pengelolaan dana sepenuhnya oleh anggota.
3. Pengembalian dana PNPM-MP oleh anggota sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal itu dikarenakan ada beberapa sanksi yang akan diberikan kepada anggota jika pengembalian tidak sesuai dengan prosedur.

5.2.Saran

1. Dengan adanya bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP) di Kecamatan Talamau yang dianggap sudah banyak membantu masyarakat diharapkan kepada pemerintah untuk bisa memberikan dana yang lebih besar lagi.
2. Diharapkan pada saat musyawarah tentang PNPM-MP di Kecamatan, Pemerintah Kecamatan melibatkan anggota kelompok, tidak hanya ketua kelompok dan sekretaris saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, Rochimin. 2004. *Pengembangan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta
- Desvitri. 2005. *Analisis Kegiatan dan Pengembangan Dana Bantuan Program Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. [Skripsi] Padang. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas.
- [Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan] Direktorat Jendral. 2003. *Pedoman peningkatan Mutu Intensifikasi Tanaman Pangan*. Jakarta
- Febrianti. 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Jagung*. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang
- Gambaran Umum PNPM. 2007. org/id/profil/-pnpm.htm/-28 K.
- Gaspersa, Vincent. 1999. *Teknik Penarikan Contoh Untuk Penelitian Servey*. Tarsito. Bandung
- Ginting, MR. 2001. *Monitoring dan Evaluasi Kerja Kelompok Tani PMSPDMP*. Departemen Pertanian.
- Kastasasmita, Ginanjar. 1996. *Pertumbuhan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Cido. Jakarta.
- Kastasasmita, Ginanjar. 1997. *Kemiskinan*. Balai Pustaka Jakarta
- LPEP Fekon. *Unand Balitbang Sumatera Barat*. 2005. *Kajian Tingkat Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat*.
- Rosnita. 2001. *Efektifitas Program Tekesra dan Kekesra dalam Pengentasan Kemiskinan/Inpres Desa Tertinggal di Kabupaten Padang Pariaman*. [Skripsi] Fakultas Hukum. Unand. Padang.
- Rielyan. 2006. *Pemberdayaan pembangunan Petani Melalui Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM)*. [Skripsi] Fakultas Pertanian. Unand Padang.
- Salim, Emil. 1980. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Yayasan Indayu. Jakarta.
- Syamsudin, U. 1987. *Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bina Cipta Bandung